

336.24

JAM
2

ei

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBELUM DAN SELAMA KRISIS EKONOMI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK DI WILAYAH
JAWA TENGAH DAN D. I. YOGYAKARTA**

TESIS

**Diajukan kepada Program Studi Magister Akuntansi
Universitas Diponegoro
Untuk memenuhi sebagian syarat guna memperoleh
derajat S-2 Magister Akuntansi**



Diajukan oleh :

Nama : Solich Jamin

NIM : C4 CO 99 234

Kepada

**PROGRAM STUDI MAGISTER AKUNTANSI
PROGRAM PASCA SARJANA
UNIVERSITAS DIPONEGORO
TAHUN 2001**

1

UPT-PUSTAK-UNDIP

Tesis berjudul

**ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBELUM DAN SELAMA KRISIS EKONOMI
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK
DI WILAYAH JAWA TENGAH DAN D.I. YOGYAKARTA**

Yang dipersiapkan oleh :

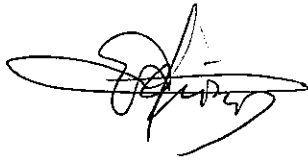
Solich Jamin

telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

pada tanggal 1 Nopember 2001

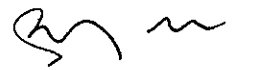
dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diterima

Pembimbing Utama/Ketua



Drs. Sugiono, MSIE

Pembimbing / Anggota



Drs. Anis Chariri, M.Com

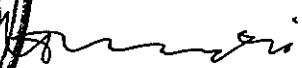
Semarang, 1 Nopember 2001

Universitas Diponegoro

Program Pasca Sarjana

Program Studi Magister Akuntansi

Ketua Program



Drs. H. Mohammad Nasir, Msi, Akt.

Motto :

“ Berusahalah untuk selalu berbuat baik karena kebaikan akan mendatangkan ketenangan batin, dan perbuatan baik akan membawa kita kepada keberhasilan yang diridloi Allah SWT.”

Persembahan :

Untuk Keluargaku :

Isteriku Yuniati,

Anakku Riena Yuly Arthanti

Dan

Sonny Iman Cakranegara

RINGKASAN

Tesis ini bertujuan untuk menganalisis apakah krisis ekonomi mempunyai dampak terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga menurunkan tingkat kepatuhannya. Oleh karena itu dengan mengambil sampel pada 15 KPP di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, penelitian dilaksanakan terhadap data tingkat kepatuhan wajib pajak badan dan wajib pajak orang pribadi yang ditentukan berdasarkan rasio antara wajib pajak yang memasukkan SPT dengan wajib pajak efektif pada masing-masing KPP. Sedangkan periode penelitiannya meliputi tahun pajak 1994 sampai dengan 1999.

Dengan teknik uji beda dua rata-rata berpasangan, hasil penelitian menunjukkan hal-hal sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan badan selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.
2. Tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan orang pribadi selama krisis ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.
3. Tingkat kepatuhan wajib pajak penghasilan secara total selama krisis ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.

Penelitian ini dilaksanakan dengan asumsi bahwa wajib pajak yang memasukkan SPT ke KPP telah melaksanakan *self assesment system*, yaitu melaporkan, mengisi dan menyampaikan sendiri SPT-nya ke KPP dengan benar, lengkap dan jelas. Ketepatan waktu pembayaran pajak tidak dipertimbangkan dalam penelitian ini, karena pelaksanaan pembayaran oleh wajib pajak masih menunggu penerbitan SKP oleh KPP setelah sebelumnya KPP memproses dan meneliti SPT yang diterima dari para wajib pajak.

ABSTRACT

The objective of this thesis was to analyse whether economic crisis influenced the disciplinary of tax payers in their tax obligations, so that it might decrease the level of their tax compliance. The sample used in this research consisted of 15 tax service offices (KPP) in Central Java and Special Province of Yogyakarta (DIY). This study was hold on the tax compliance level from corporate income tax payer and personal income tax payer. The level of tax compliances based on the ratio between tax payer who included tax report (SPT) to KPP and tax payer who has to include SPT (Effective tax payer) on each KPP. Meanwhile, the periode of the research was taken from the 1994 tax year until 1999.

Using the statistical technique of paired difference test of two means the results of this study were as follows :

1. The tax compliance level of corporate income tax payers during economic crisis was not decreased compared to that before economic crisis.
2. The tax compliance level of personal income tax payers during economic crisis decreased compared to that before economic crisis.
3. The tax compliance level of corporate and personal income tax payers as a whole during economic crisis decreased compared to that before economic crisis.

This research was held with an assumption that tax payers who have included SPT in KPP have made self assessment system such as reporting, filling in and giving their true or correct, complete and clear SPT to KPP. The punctuality in the tax payment was not addressed, since the payment was waiting for the publishment of SKP by KPP after KPP processed and reviewed the SPT given by the tax payers.

KATA PENGANTAR

Bismillahirrokhmaanirrokhim,

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan berkat, rahmat dan hidayah serta ridlo-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini. Tesis ini merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program Magister Akuntansi di Universitas Diponegoro Semarang.

Tesis yang berjudul : “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi pada KPP di Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta”, penulis maksudkan untuk menganalisis apakah krisis ekonomi mempunyai dampak terhadap wajib pajak sehingga merubah tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tesis ini tidak mungkin terwujud tanpa bantuan semua pihak baik moril maupun materiil. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih yang tak terhingga kepada :

1. Bapak Drs. H. Daryono Rahardjo, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi UNDIP, Bapak Drs. H. Mohamad Nasir, MSi,Akt. selaku Ketua Pengelola Program Magister Akuntansi UNDIP beserta Staf, dan Bapak / Ibu Dosen yang telah membimbing dan membekali ilmu pengetahuan kepada penulis dalam menyelesaikan program ini.

2. Bapak Drs. Sugiono, MSIE. selaku Pembimbing I, dan Bapak Drs. Anis Chariri, M.Com. selaku Pembimbing II yang telah memberikan segala bentuk bimbingan yang sangat bermanfaat dalam penulisan tesis ini.
3. Bapak Drs. Ari Sulendro, MA. selaku Kepala BPKP, dan Bapak Drs. H.M. Chatim Baidaie selaku Deputi Kepala BPKP Bidang Administrasi yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di luar kedinasan, serta Bapak Drs. Agus Setiasena selaku Kepala Perwakilan BPKP Propinsi Jawa Tengah beserta Staf yang telah banyak memberikan bantuan kepada penulis dalam pelaksanaan tugas-tugas pendidikan tersebut.
4. Bapak Drs. H. Ichwan Fachrudin, MA. selaku Kepala Kantor Wilayah VIII – DJP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta beserta Staf, Kepala Bagian Umum dan Kepala Bidang Informasi dan Administrasi Perpajakan yang telah banyak membantu penulis dalam Survei Data Penelitian yang diperlukan dalam tesis ini.
5. Bapak / Ibu rekan-rekan seperjuangan dari Program Magister Akuntansi UNDIP Angkatan I khususnya Drs. H. Soekamto, Sri Yamti, SE.Akt., Sumardi, MSi.Akt., Tri Wibowo, Msi.Ak., Hendri Santosa, Ak., Irwan MH dan M. Ardinata yang telah banyak membantu dan memberi semangat kepada penulis.
6. Bapak / Ibu rekan-rekan ex Tim Gabungan DJP-BPKP Jawa Tengah yang banyak membantu penulis selama pendidikan maupun dalam menyusun tesis ini; termasuk mas Prabowo dari LPK “Budiman”.

7. Keluarga penulis, istreriku dan anak-anakku tercinta yang dengan penuh kesabaran dan tawakkal telah memberikan bantuan yang tak ternilai bagi penulis.

Dalam bagian akhir kata pengantar ini, penulis menyadari juga bahwa tesis ini masih banyak kekurangannya. Oleh karena itu segala kritik dan saran penulis terima dengan senang hati demi kesempurnakan tesis ini. Namun demikian penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat bagi pihak yang berkepentingan.

Penulis,

Solich Jamin

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
RINGKASAN / ABSTRACT	iv
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang Masalah	1
1.2. Perumusan Masalah	5
1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1. Definisi Pajak	7
2.1.2. Fungsi Pajak	8
2.1.3. Perundang-undangan yang berlaku	8
2.1.4. Kepatuhan	10
2.1.5. Kepatuhan WP	12
2.1.6. Kepatuhan WP dan Motivasi	14
2.1.7. Krisis Ekonomi	14

2.2.	Penelitian Sebelumnya	16
2.3.	Kerangka Pemikiran Teoritis	20
2.4.	Perumusan Hipotesis	23
BAB III.	METODE PENELITIAN	24
3.1.	Jenis dan Sumber Data	24
3.2.	Populasi dan Prosedur Pemilihan Sampel	26
3.3.	Prosedur Pengumpulan Data	26
3.4.	Definisi Operasional dan Identifikasi Variabel	27
3.5.	Teknik Analisis	30
BAB IV.	PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN	35
4.1.	Tabulasi Data Penelitian	35
4.2.	Uji Distribusi Data Penelitian	36
4.3.	Analisis Hasil Penelitian	39
4.4.	Pembahasan Hasil Penelitian	52
BAB V.	KESIMPULAN DAN SARAN	53
5.1.	Kesimpulan	53
5.2.	Keterbatasan Penelitian	54
5.3.	Saran	55
	DAFTAR PUSTAKA	57
	LAMPIRAN – LAMPIRAN	59
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	76

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 1.1 Peran Pajak Terhadap APBN Tahun 1994/1995 s/d 1999/2000	1
2. Tabel 1.2 Pertumbuhan Ekonomi dan Kepatuhan WP Tahun 1994 - 1999	4
3. Tabel 2.1 UU Pajak Yang Berlaku Sejak 1-1-1984 Sampai Dengan Sekarang	9
4. Tabel 2.2 Persamaan dan Perbedaan Penelitian Sebelumnya Dengan Penelitian Ini	19
5. Tabel 3.1 Daftar KPP di Wilayah Kanwil VIII DJP Jateng dan D.I. Yogyakarta Per 31 Desember 2000	25
6. Tabel 3.2 Identifikasi Pengukuran Tingkat Kepatuhan WP	29
7. Tabel 4.1 Hasil Uji Normalitas Data Tingkat Kepatuhan WP PPh Badan	38
8. Tabel 4.2 Hasil Uji Normalitas Data Tingkat Kepatuhan WP PPh Orang Pribadi	38
9. Tabel 4.3 Hasil Uji Normalitas Data Tingkat Kepatuhan WP PPh Total	39
10. Tabel 4.4 Hasil Uji Beda Rata-Rata Kepatuhan WP PPh Badan	41
11. Tabel 4.5 Hasil Uji Beda Rata-Rata Kepatuhan WP PPh Badan Sebelum dan Selama Krisis	43

12. Tabel 4.6	Hasil Uji Beda Rata-Rata Kepatuhan WP PPh Orang Pribadi	44
13. Tabel 4.7	Hasil Uji Beda Rata-Rata Kepatuhan WP PPh Orang Pribadi Sebelum dan Selama Krisis	47
14. Tabel 4.8	Hasil Uji Beda Rata-Rata Kepatuhan WP PPh Total	48
15. Tabel 4.9	Hasil Uji Beda Rata-Rata Kepatuhan WP PPh Total Sebelum dan Selama Krisis	50

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
1. Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran Teoritis Tentang Kepatuhan WP Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi	22
2. Gambar 3.1 Uji Beda Dua Rata-Rata Berpasangan	31
3. Gambar 4.1 Trend Rata-Rata Tingkat Kepatuhan WP PPh Badan Tahun Pajak 1994 Sampai 1999	42
4. Gambar 4.2 Trend Rata-Rata Tingkat Kepatuhan WP PPh Orang Pribadi Tahun Pajak 1994 Sampai 1999	46
5. Gambar 4.3 Trend Rata-Rata Tingkat Kepatuhan WP PPh Total Tahun Pajak 1994 Sampai 1999	50

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Lampiran 1 : Tabulasi Data	59
2. Lampiran 2 : Hasil Uji Normalitas	65
3. Lampiran 3 : Hasil Uji Hipotesis	67

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan kebijaksanaan yang tercantum dalam Garis Besar Haluan Negara (GBHN), Pemerintah harus mengupayakan peningkatan sumber dana pembangunan yang digali dari dalam negeri. Hal tersebut tercermin dalam Struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dimana penerimaan dalam negeri dari sektor perpajakan dari waktu ke waktu menunjukkan peran yang cukup penting, sebagaimana tabel di bawah ini.

TABEL 1.1

PERAN PAJAK TERHADAP APBN TAHUN 1994/1995 S/D 1999/2000

No.	Tahun Anggaran	Jumlah (Milyar Rp)		Prosentase Pajak : APBN
		APBN	Pajak	
1.	1994 / 1995	69.749,10	33.991,90	48,70
2.	1995 / 1996	78.024,70	41.876,90	53,60
3.	1996 / 1997	90.616,40	50.502,00	55,70
4.	1997 / 1998	101.086,40	56.587,00	56,30
5.	1998 / 1999	263.888,10	72.930,80	27,64
6.	1999 / 2000	218.203,80	94.039,70	43,09

Sumber : - Nota Keuangan 1998/1999.

- Pengantar RAPBN 2000.

Dari angka-angka tersebut di atas terlihat bahwa peran pajak terhadap APBN sejak tahun anggaran 1994/1995 s/d 1999/2000 rata-rata di atas 25 % bahkan tahun anggaran 1997/1998 mencapai 56,30 %. Kondisi tersebut di atas mengakibatkan beban tugas yang diemban oleh aparat perpajakan akan semakin berat, sebagaimana yang dikemukakan oleh Rochmat Soemitro (1993, h. 157) yang menyatakan bahwa tugas yang penting adalah upaya membangkitkan kesadaran pajak (*tax consciousness*) untuk menjadi wajib pajak (WP) yang patuh. Menurut Gibson (1991) yang dikutip Agus Budiarmanto (1999, h. 2) perilaku patuh WP sangat dipengaruhi oleh variabel perilaku individu dan lingkungan.

Menteri Koordinator Pengawasan Pembangunan / Penertiban Aparatur Negara (Menko Wasbang / PAN) dalam Seminar Optimalisasi Penerimaan Negara tanggal 13 Juli 1998 menyatakan keinginannya untuk meningkatkan *tax ratio* yang sekarang sebesar 11,8 % menjadi 16 % pada tahun 2000, mengingat *tax ratio* Indonesia masih terendah diantara negara-negara ASEAN. Berdasarkan perhitungannya, keinginan tersebut dapat dicapai dalam kondisi krisis moneter sudah berlalu. Sementara itu salah satu upaya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dalam mendongkrak *tax ratio* adalah dengan meningkatkan tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*). Menurut perhitungan DJP untuk meningkatkan *tax ratio* dari 11,8 % menjadi 16 % diperlukan *tax compliance* sebesar 68 %.

Beberapa Aspek Perpajakan setiap tahun dilaporkan oleh DJP dalam Bab II Laporan Tahunan antara lain mengenai Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak. DJP mengukur tingkat kepatuhan WP melalui pengukuran kepatuhan penyampaian SPT

yaitu dengan menetapkan rasio antara SPT yang diterima dengan SPT yang dikirim. Rasio tersebut sama dengan perbandingan antara WP yang menyampaikan SPT dengan WP yang seharusnya menyampaikan SPT (WP Efektif).

Sejak diadakannya reformasi dibidang peraturan perpajakan tahun 1983, Pemerintah telah merubah sistim perpajakan dari "*official assessment*" menjadi "*self assessment*". Agar *self assessment system* tersebut dapat terlaksana dengan baik, menurut Gunadi (1999, h. 40) dibutuhkan suatu pilar penyangga niat yang baik yaitu *voluntary compliance* (kepatuhan sukarela). Dengan *self assessment system*, WP diharuskan menghitung, menetapkan, melaporkan, dan membayar sendiri kewajiban perpajakannya; oleh karena itu, pemenuhan kewajiban pajaknya sendiri oleh WP, sangat dipengaruhi oleh perilaku individu WP.

Sementara itu kondisi lingkungan juga sangat mempengaruhi kepatuhan WP antara lain terjadinya krisis ekonomi pada tahun 1997. Menurut Mc. Leod (1998), krisis yang terjadi di Indonesia sangat berdampak pada sektor riil dan sektor finansial, sehingga akan sangat berpengaruh pada perusahaan-perusahaan. Sedangkan *The National Economic Action Council* (1998), menyimpulkan bahwa di Indonesia sektor perusahaan menjadi sangat rentan akibat melemahnya nilai tukar mata uang sehingga sangat mempengaruhi persaingan sektor riil. Perusahaan yang pengadaan bahan bakunya harus dibayar dengan valuta asing dan menerima hasil penjualan produk jadinya dengan rupiah akan mengalami kesulitan keuangan dan sebaliknya.

Sebagai gambaran, pengaruh krisis ekonomi terhadap pertumbuhan ekonomi yang ditunjukkan oleh laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Brutto (PDRB) di Jawa Tengah dan kepatuhan WP pada Kantor Wilayah VIII DJP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, digambarkan dalam tabel di bawah ini :

TABEL 1.2
PERTUMBUHAN EKONOMI DAN KEPATUHAN WP TAHUN 1994 - 1999

No.	Tahun Pajak	Tingkat Pertumbuhan PDRB	Tingkat Kepatuhan WP	
			PPh Badan	PPh Perorangan
1	1994	6,40 %	66,41 %	66,81 %
2	1995	7,39 %	66,30 %	65,48 %
3	1996	7,30 %	65,34 %	63,77 %
4	1997	3,03 %	66,31 %	61,10 %
5	1998	- 11,74 %	64,54 %	57,87 %
6	1999	3,41 %	64,78 %	59,18 %

Sumber : - Jawa Tengah Dalam Angka : 1994 - 1999.

- Laporan Pengolahan Data SPT Tahunan.

Tingkat Pertumbuhan PDRB dihitung berdasarkan harga konstan tahun 1993. Sedangkan Tingkat Kepatuhan WP baik Pajak Penghasilan (PPh) Badan maupun PPh Perorangan ditentukan sesuai dengan perhitungan menurut DJP yaitu dengan membandingkan jumlah WP yang memasukkan SPT ke KPP dengan jumlah WP efektif tahun yang bersangkutan. WP efektif merupakan WP yang sudah terdaftar di KPP dan aktif melaksanakan kegiatannya dalam suatu periode tahun pajak sehingga wajib menyampaikan SPT ke KPP. Dari angka-angka tersebut di atas

menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan ekonomi dan tingkat kepatuhan WP mengalami penurunan setelah tahun 1997. Kondisi di atas sangat berbeda dengan periode beberapa tahun setelah penerapan *self assessment*.

Setelah lebih dari 10 tahun sejak penerapan *self assessment*, penerimaan pajak meningkat, bahkan realisasinya selalu lebih besar rata-rata 10 % dari yang direncanakan. Hal tersebut didukung dengan hasil penelitian Agus Budiartanto (1999) yang menyimpulkan bahwa kepatuhan WP setelah reformasi lebih baik (berdasarkan dana yang terhimpun). Namun demikian kepatuhan tersebut tidak mengalami peningkatan (berdasarkan pada jumlah WP yang terjaring).

Mengingat keinginan Pemerintah untuk meningkatkan *tax ratio* dan usaha DJP untuk mewujudkan keinginan tersebut terkait dengan kondisi krisis ekonomi dan tingkat kepatuhan Wajib Pajak, maka dalam penelitian ini akan dianalisis bagaimana tingkat kepatuhan Wajib Pajak sebelum krisis ekonomi dibandingkan dengan tingkat kepatuhan selama krisis ekonomi didasarkan pada pengukuran sesuai dengan yang digunakan oleh DJP yaitu jumlah WP yang menyampaikan SPT dibandingkan dengan jumlah WP yang seharusnya menyampaikan SPT (WP efektif). Analisis tersebut akan dituangkan dalam tesis yang berjudul : “Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Selama Krisis Ekonomi pada Kantor Pelayanan Pajak di Wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta”.

1.2. Perumusan Masalah

Terjadinya krisis ekonomi tahun 1997 telah mempengaruhi kinerja perusahaan (WP) sehingga berakibat pada penurunan jumlah perusahaan yang aktif maupun

jumlah WP yang menyampaikan SPT ke KPP. Permasalahannya adalah : Apakah tingkat kepatuhan WP PPh Badan, PPh Perorangan maupun PPh Total selama krisis ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan WP sebelum krisis ekonomi.

1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah krisis ekonomi mempunyai dampak negatif terhadap WP, sehingga menurunkan tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b. Manfaat Penelitian

Dengan diketahuinya tingkat kepatuhan WP sebelum dan selama krisis ekonomi, penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan masalah dibidang perpajakan, yaitu :

1. Pengembangan ilmu akuntansi perpajakan bagi para akuntan dan calon akuntan yang bekerja di perusahaan maupun dunia pendidikan.
2. Penyempurnaan kebijakan di bidang perpajakan pada Direktorat Jenderal Pajak, khususnya pemeriksaan dan penyidikan pajak.
3. Membantu perencanaan target penerimaan dari sektor pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

2.1. Landasan Teori

2.1.1. Definisi Pajak

Menurut Rochmat Soemitro dalam Agus Budiarmanto (1999, h. 15) dikatakan bahwa :

“ Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum “.

Sementara itu, menurut Djajaningrat yang dikutip Agus Budiarmanto (1999, h. 15) definisi pajak adalah :

“ Pajak sebagai kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan kepada negara disebabkan oleh suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan perundang-undangan yang ditetapkan pemerintah, serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa balik dari negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan umum “.

Dari definisi-definisi tersebut di atas dapat dirangkum dalam pengertian pajak adalah sebagai berikut :

- a. Pajak merupakan pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
- b. Penggunaannya diatur berdasarkan undang-undang
- c. Dapat dipaksakan

- d. Untuk keperluan pembiayaan umum
- e. Kontraprestasi tidak secara langsung

2.1.2. Fungsi Pajak

Pada dasarnya fungsi pajak dapat dibedakan menjadi 2 fungsi, yaitu fungsi budgeter dan fungsi regulerend.

Fungsi budgeter adalah fungsi penyediaan dana guna membiayai keperluan-keperluan negara. Sedangkan fungsi regulerend adalah fungsi untuk mengatur tercapainya keseimbangan perekonomian dan politik suatu negara.

2.1.3. Perundang-undangan yang berlaku

Undang-undang pajak yang masih berlaku dalam periode penelitian ini adalah :

1. Undang Undang Republik Indonesia (UU RI) No. 9 Tahun 1994 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (KUP), sebagai penyempurnaan UU No. 6 Tahun 1983. Terakhir adalah UU RI No. 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
2. UU RI No. 10 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan (PPh), sebagai penyempurnaan UU No. 7 Tahun 1983. Terakhir adalah UU RI No. 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.
3. UU RI No. 11 Tahun 1994 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPn BM), sebagai penyempurnaan UU No. 8

Tahun 1983. Terakhir adalah UU RI No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.

Ketentuan-ketentuan mengenai WP Badan dan WP Perorangan serta SPT diatur dalam Pasal 1 dan Pasal 3 UU Nomor 9 Tahun 1994 dan Pasal 2 UU Nomor 10 Tahun 1994.

Pada intinya ketentuan tersebut mewajibkan agar setiap WP membuat dan menyampaikan SPT tahunannya ke KPP secara benar, lengkap dan jelas. Batas waktu penyampaian SPT tersebut adalah 3 bulan setelah berakhirnya tahun pajak. Perpanjangan batas waktu penyerahan SPT dapat dilakukan berdasarkan permohonan WP yang disertai dengan persyaratan dan alasan yang dapat diterima oleh DJP. Batas waktu perpanjangan paling lambat adalah 9 bulan setelah akhir tahun pajak.

Masa berlakunya ketiga UU tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.1
UU PAJAK YANG BERLAKU
SEJAK 1-1-1984 SAMPAI DENGAN SEKARANG

No.	Materi / Isi	Sejak 1-1-1984	Sejak 1-1-1992	Sejak 1-1-1995	Sejak 1-1-2001
1	KUP	UU No. 6 Th. 1983	-	UU No. 9 Th. 1994	UU No. 16 Th. 2000
2	PPh	UU No. 7 Th. 1983	UU No. 7 Th. 1991	UU No. 10 Th. 1994	UU No. 17 Th. 2000
3	PPN / PPn. BM	UU No. 8 Th. 1983	-	UU No. 11 Th. 1994	UU No. 18 Th. 2000

Sumber : Undang Undang Perpajakan Indonesia Tahun 1984 s.d. 2000.

2.1.4. Kepatuhan

Menurut Badudu dan Zain (1995) yang dikutip Kiryanto (1998, h. 31) dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, kepatuhan berarti tunduk atau patuh pada aturan atau ajaran. Sedangkan Gibson (1991) dalam Agus Budiarmanto (1999, h. 35) menyatakan bahwa kepatuhan adalah motivasi seseorang, kelompok atau organisasi untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Perilaku patuh seseorang merupakan interaksi antara perilaku individu, kelompok dan organisasi.

Mengenai motivasi, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan sebagai berikut :

1. Robbins (1996, h. 198) menyatakan bahwa motivasi adalah kesediaan untuk mengeluarkan tingkat upaya yang tinggi ke arah tujuan organisasi, yang dikondisikan oleh kemampuan upaya itu untuk memenuhi sesuatu kebutuhan individual.
2. Siagian (1996, h. 128) mendefinisikan pergerakan (*motivating*) sebagai : Keseluruhan proses pemberian motif bekerja kepada para bawahan sedemikian rupa sehingga mereka mau bekerja dengan ikhlas demi tercapainya tujuan organisasi dengan efisien dan ekonomis.
3. Indriyo dan Nyoman (1997) dalam Agus Budiarmanto (1999, h. 36) menyebutkan bahwa motivasi adalah faktor-faktor yang ada dalam diri seseorang yang menggerakkan perilakunya untuk memenuhi tujuan tertentu.

Proses timbulnya motivasi pada seseorang diilustrasikan oleh Gibson (1991) yang dikutip Agus Budiarmanto (1999, h. 36) dalam tahapan-tahapan sebagai berikut :

1. Mengidentifikasi semua kebutuhan diri yang belum terpenuhi, yang akan mendorong seseorang untuk memenuhinya.
2. Mencari dan memilih berbagai alternatif cara yang tepat untuk memuaskan kebutuhannya.
3. Mengarahkan perilaku kepada tujuan (kepuasan) yang akan dicapai dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketrampilannya.
4. Menilai prestasi seseorang baik oleh dirinya sendiri maupun oleh orang lain. Perilaku untuk memenuhi kebanggaan non material diri seseorang biasanya penilaiannya dilakukan oleh diri sendiri, sedang perilaku untuk memenuhi kebutuhan material biasanya penilaiannya dilakukan oleh orang lain.
5. Menilai imbalan atau kerugian yang telah diterima, apakah telah memuaskan atau belum.
6. Jika penilaiannya terhadap imbalan yang diterimanya belum memuaskan kebutuhannya, maka proses identifikasi kebutuhan yang belum terpenuhi akan berulang lagi.

Dari definisi dan uraian tersebut di atas terlihat bahwa motivasi seseorang sangat dipengaruhi oleh faktor individu (*internal*) dan faktor lingkungan (*eksternal*). Faktor *internal* adalah kemauan yang muncul dari dalam diri seseorang, sedangkan faktor *eksternal* adalah kekuatan dari luar diri seseorang yang

berpengaruh terhadap pola pikir dan perilaku seseorang. Lingkungan akan berpengaruh besar terhadap perilaku seseorang.

Konsep pembahasan teori motivasi dibagi menjadi dua tinjauan yaitu *Content Theory* dan *Process Theory*. Teori yang pertama terfokus pada faktor-faktor individu yang dapat menumbuhkan, mengarahkan dan menghentikan perilaku seseorang. Sedangkan teori kedua mempunyai fokus bagaimana perilaku ditumbuhkan, diarahkan dan dihentikan, sehingga dari kedua teori tersebut dapat dikatakan bahwa perilaku individu sangat berperan dalam motivasi dan kepatuhan.

2.1.5. Kepatuhan WP

Kepatuhan berarti patuh dan taat pada peraturan yang berlaku. Dalam hal pajak, aturan yang berlaku adalah peraturan perpajakan. Sedangkan WP adalah orang atau badan yang karena peraturan perpajakan wajib melaporkan dan membayar pajak. Kepatuhan Wajib Pajak adalah tingkat ketaatan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Menurut E. Ellyani (1989) yang dikutip Kiryanto (1998, h. 32) disebutkan bahwa :

“ Kepatuhan WP didefinisikan sebagai memasukkan dan melaporkan pada waktunya informasi yang diperlukan, mengisi secara benar jumlah pajak yang terutang dan membayar pajak pada waktunya, tanpa ada tindakan pemaksaan. Ketidakpatuhan timbul kalau salah satu syarat definisi tersebut tidak dipenuhi “.

Sementara menurut Novak (1989) yang dikutip Kiryanto (1998, h. 32) dinyatakan bahwa :

“ suatu iklim Kepatuhan WP adalah :

1. WP paham dan berusaha memahami UU Pajak,
2. Mengisi formulir pajak dengan benar,
3. Menghitung jumlah pajak dengan benar,
4. Membayar pajak tepat waktunya “.

Kepatuhan WP dalam melaksanakan peraturan pajak yang berlaku dipengaruhi oleh motivasi WP. Motivasi yang mendorong kepatuhan WP dapat diduga dan dimanipulasi dengan mengukur intensitas WP dalam mengisi dan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP). Perusahaan dan perorangan yang terdaftar sebagai WP dan aktif melaksanakan kegiatan usahanya dalam suatu periode tahun pajak, menurut peraturan perpajakan mempunyai kewajiban mengisi / membuat dan menyampaikan / melaporkan SPT Tahunan serta membayar pajak terutang. Pelaksanaan atas kewajiban tersebut mencerminkan kepatuhan WP yang bersangkutan. Oleh karena itu makin banyak WP yang menyampaikan SPT Tahunan ke KPP mencerminkan adanya peningkatan kepatuhan WP dalam wilayah KPP tersebut dan sebaliknya. Dengan demikian, kepatuhan WP dalam wilayah suatu KPP dapat diukur berdasarkan jumlah WP yang memasukkan SPT Tahunan ke KPP dibandingkan dengan jumlah WP yang seharusnya menyampaikan SPT Tahunan ke KPP (WP efektif).

2.1.6. Kepatuhan WP dan Motivasi

Berdasarkan uraian sebelumnya, maka kepatuhan WP dapat dikatakan sebagai suatu kondisi tingkat perilaku WP dalam mematuhi atau mentaati ketentuan atau aturan perpajakan yang berlaku. Perilaku WP sangat dipengaruhi oleh motivasi yaitu faktor-faktor dalam diri WP yang membentuk usaha yang maksimal untuk mencapai tujuan tertentu.

Motivasi adalah konsep yang abstrak, oleh karena itu untuk mengukur pengaruhnya terhadap perilaku dilaksanakan dengan menduga variabel yang berhubungan dengan perilaku tersebut. Motivasi yang mendorong kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dapat diduga dengan mengukur variabel intensitas WP dalam mengisi dan menyampaikan SPT ke KPP. WP yang harus menyampaikan SPT ke KPP adalah WP Efektif, namun karena pengaruh motivasi, dalam kenyataannya terdapat WP Efektif yang berperilaku patuh yaitu memasukkan SPT ke KPP dan terdapat juga WP Efektif yang berperilaku tidak patuh, yaitu tidak menyampaikan SPT ke KPP. Untuk mengukur tingkat kepatuhan WP ditentukan oleh rasio antara WP Efektif yang memasukkan SPT ke KPP dengan jumlah WP Efektif.

2.1.7. Krisis Ekonomi

Krisis ekonomi yang melanda Indonesia diawali dengan depresi Rupiah terhadap Dollar Amerika Serikat (AS) pada pertengahan bulan Juli 1997. Pada tanggal 22 Juli 1997 nilai kurs Rupiah terhadap Dollar AS tercatat di Bank Indonesia

dengan kurs beli sebesar Rp 2.590,00, sedangkan kurs jual sebesar Rp 2.648,00, sehingga nilai kurs tengahnya adalah sebesar Rp 2.619,00. Kondisi tersebut pada saat itu oleh para pengamat belum ditanggapi secara serius, mengingat mata uang Bath Thailand juga sedang mengalami depresi. Usaha pemerintah melalui BI dengan pengetatan likuiditas dan menaikkan suku bunga guna menguatkan Rupiah tidak berhasil, bahkan Rupiah semakin merosot seiring dengan terjadinya gejolak politik dan keamanan, sehingga pada tanggal 17 Juni 1998 tercatat di BI kurs beli sebesar Rp 14.750,00 dan kurs jual sebesar Rp 15.750,00 sehingga nilai kurs tengahnya sebesar Rp 15.250,00.

Menurut Edy Suandi Hamid dan Hendrie Anto (2000, h. xiii), meskipun krisis ini semula merupakan *contagion effect* dari depresiasi mata uang bath Thailand terhadap dollar AS, tetapi karena fundamental perekonomian Indonesia rapuh, maka dampak krisis ini lebih dahsyat, sementara proses *economic recovery*-nya berjalan amat lamban. Krisis ini telah mengoyak sendi-sendi kehidupan berbangsa, bahkan tidak saja pada sendi perekonomian, tetapi jauh menyentuh berbagai aspek.

Melemahnya Rupiah sangat mempengaruhi pelaksanaan APBN, khususnya anggaran pembangunan yang dibiayai dengan pinjaman luar negeri. Sedangkan para pengusaha swasta makin terbebani dalam melunasi pinjaman valuta asingnya yang sudah jatuh tempo, sehingga banyak yang menutup usahanya. Sementara itu para investor lebih memilih menjadi *profit taking* dari pada mengembangkan investasinya.

Persoalan-persoalan yang dihadapi pemerintah khususnya kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI), penyelesaian kasus-kasus Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) yang berlarut-larut ditambah lagi dengan munculnya gangguan keamanan di beberapa wilayah Indonesia membuat suasana semakin tidak kondusif bagi dunia usaha, baik yang dilaksanakan oleh badan usaha maupun perorangan, sehingga pada akhirnya akan mempengaruhi para WP dalam memenuhi kewajibannya. Kondisi tersebut tercermin dari banyaknya perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan sehingga menghindar dari kewajiban membayar pajaknya. Sementara itu bagi perusahaan yang tidak dapat mengatasi kesulitan keuangan memilih menghentikan operasinya. Jika dikaitkan dengan kewajiban penyampaian SPT ke KPP, maka kemungkinan dapat terjadi hal-hal sebagai berikut :

1. WP tetap melaksanakan kegiatannya dan menyampaikan SPT ke KPP.
2. WP memohon penundaan penyampaian SPT ke KPP.
3. WP tidak menyampaikan SPT ke KPP sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
4. WP menghentikan operasinya (bubar) dan memohon untuk dicabut Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) nya, sehingga mengurangi jumlah WP yang efektif.

2.2. Penelitian Sebelumnya

Penelitian mengenai kepatuhan WP telah dilakukan oleh Agus Budiatmanto (1999), yang mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

- a. Tujuan penelitian adalah memberikan bukti empiris bahwa penerapan *self assessment system* akan berdampak positif terhadap kepatuhan WP.
- b. Responden dalam penelitian tersebut terdiri dari WP Penghasilan baik perorangan maupun badan.
- c. Sampel penelitiannya adalah WP badan maupun perorangan dalam wilayah Kantor Wilayah VIII DJP Jateng dan D.I. Yogyakarta tahun 1979 s.d tahun 1988.
- d. Alat analisis yang digunakan adalah : Uji Beda dua rata - rata observasi berpasangan.

Kesimpulan penelitian Agus Budiarmanto adalah :

1. Kepatuhan WP sesudah reformasi UU Pajak Tahun 1983 lebih baik daripada sebelum reformasi (berdasarkan rupiah yang terhimpun).
2. Kepatuhan WP sesudah reformasi UU Pajak Tahun 1983 tidak lebih baik daripada sebelum reformasi (berdasarkan jumlah WP yang terjaring).

Penelitian lainnya dilaksanakan oleh Kiryanto (1998). Hal - hal yang dikemukakan adalah :

- a. Tujuan penelitiannya adalah untuk mengetahui apakah terdapat hubungan positif antara penerapan Struktur Pengendalian Intern dengan kepatuhan WP, dan apakah Struktur Pengendalian Intern berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP.
- b. Yang menjadi responden adalah semua perusahaan manufaktur yang ada di Koda Yogyakarta yang masih aktif.

- c. Sampel penelitian adalah perusahaan manufaktur yang dipilih dengan teknik *Stratified Random Sampling*.
- d. Teknik uji analisis yang digunakan adalah : Uji Korelasi dan Uji Regresi.

Kesimpulan penelitian Kiryanto adalah :

1. Penerapan Struktur Pengendalian Intern mempunyai hubungan yang positif dengan Kepatuhan WP.
2. Penerapan Struktur Pengendalian Intern mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan WP.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya khususnya yang dilaksanakan oleh Agus Budiarmanto (1999) adalah pada variabel yang menjadi dasar pengukurannya. Agus Budiarmanto mengukur tingkat kepatuhan WP berdasarkan jumlah penerimaan pajak (Rupiah yang terhimpun) dan jumlah WP yang terjaring. Sedangkan pada penelitian ini variabel yang menjadi dasar pengukurannya adalah jumlah WP yang memasukkan SPT ke KPP dan jumlah WP Efektif (WP yang masih aktif melaksanakan kegiatannya sehingga wajib menyampaikan SPT-nya ke KPP). Dasar pengukuran tersebut sesuai dengan yang digunakan oleh DJP dalam Laporan Tahunannya (Bab II) mengenai Kepatuhan Wajib Pajak. Dalam laporan tersebut Tingkat Kepatuhan WP Badan dan WP Orang Pribadi ditentukan dengan perbandingan antara SPT diterima dengan SPT dikirim yang hasilnya sama dengan perbandingan antara jumlah WP yang memasukkan SPT dengan jumlah WP efektif. Persamaan dan perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

TABEL 2.2
PERSAMAAN DAN PERBEDAAN PENELITIAN SEBELUMNYA
DENGAN PENELITIAN INI

No.	Uratan	Penelitian Sebelumnya		Penelitian Ini
		Kiryanto (1998)	Agus Budiartanto (1999)	
1	Tujuan	Mengetahui apakah terdapat hubungan positif antara penerapan SPI dengan kepatuhan WP, dan apakah penerapan SPI berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP	Memberikan bukti empiris bahwa penerapan sistem <i>self assessment</i> akan berdampak positif terhadap kepatuhan WP	Menganalisis apakah krisis ekonomi mempunyai dampak terhadap WP, sehingga merubah tingkat kepatuhan WP
2	Populasi	Perusahaan manufaktur (WP manufaktur) di Kodia Yogyakarta (115 Perusahaan)	WP PPh Badan dan WP PPh Perorangan	KPP-KPP dilingkungan Kanwil VIII DJP Jateng dan D.I. Yogyakarta (15 KPP)
3	Sampel	Perusahaan manufaktur di Kodia Yogyakarta yang masih aktif dipilih secara <i>Stratified Random Sampling</i> (52 Perusahaan)	WP PPh Badan dan WP PPh Perorangan di Kanwil VIII DJP Jateng dan D.I. Yogyakarta	KPP-KPP dilingkungan Kanwil VIII DJP Jateng dan D.I. Yogyakarta (15 KPP)
4	Variabel yang menjadi dasar pengukuran	Pelaksanaan <i>Self Assessment System</i> dalam penyampaian SPT	Jumlah penerimaan pajak (Rp) dan Jumlah WP terjaring (orang)	Jumlah WP yang memasukkan SPT dan Jumlah WP efektif
5	Teknik Pengujian	Uji Korelasi dan Uji Regresi	Uji Beda Dua Rata-Rata Observasi Berpasangan dengan program Microstat	Uji Beda Dua Rata - Rata Observasi Berpasangan dengan program SPSS
6	Periode penelitian	Tahun 1996 (s.d. 31 Desember 1996)	Tahun pajak 1989 s/d 1998 (10 tahun)	Tahun pajak 1994 s/d 1999 (6 tahun)
7	Kesimpulan	<p>1. Penerapan SPI mempunyai hubungan positif dengan Kepatuhan WP</p> <p>2. Penerapan SPI mempunyai pengaruh yang positif terhadap Kepatuhan WP</p>	<p>1. Kepatuhan WP sesudah reformasi perpajakan 1983 lebih baik dari pada sebelum reformasi (berdasarkan rupiah yang terhimpun)</p> <p>2. Kepatuhan WP sesudah reformasi perpajakan 1983 tidak lebih baik dari pada sebelum reformasi (berdasarkan jumlah WP yang terjaring)</p>	<p>1. --</p> <p>2. --</p>

2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis

Dengan diberlakukannya *self assessment system* dalam pemungutan pajak, maka Wajib Pajak diberi kepercayaan dan tanggung jawab untuk melaporkan, menghitung, dan menyetor sendiri kewajiban perpajakannya. Hal tersebut dilakukan dengan mengambil dan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) dan melapor serta menyetor pajak yang terhutang ke Kas Negara atau instansi lain yang ditunjuk untuk menerima setoran pajak. Dengan pelaksanaan kegiatan – kegiatan tersebut, WP memperoleh perlakuan yang adil dan ditempatkan sebagai pelaku aktif perpajakan. *Self assessment system* diharapkan dapat meningkatkan jumlah subjek pajak baik dalam bentuk perusahaan (badan) maupun perorangan yang mendaftarkan diri sebagai WP efektif, sekaligus meningkatkan jumlah WP yang menyampaikan SPT ke KPP. Makin banyak WP yang menyampaikan SPT yang dibuat sesuai dengan ketentuan yang berlaku, mencerminkan peningkatan kepatuhan WP.

Mengingat *self assessment system* sudah berlangsung sejak Januari 1984 maka dalam penelitian ini diasumsikan bahwa para WP Badan maupun WP Perorangan yang menyampaikan SPTnya ke KPP telah melaksanakan dengan benar, lengkap dan jelas sesuai dengan ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2 UU Nomor 9 Tahun 1994. Oleh karena itu dengan menyampaikan SPT ke KPP berarti WP telah memenuhi sebagian besar kriteria kepatuhan Wajib Pajak yang disebutkan baik oleh E. Ellyani (1989) maupun Novak (1989).

Sebagaimana kita ketahui, terjadinya krisis ekonomi sejak tahun 1997 telah mempengaruhi kinerja perusahaan baik perorangan maupun badan usaha. Untuk

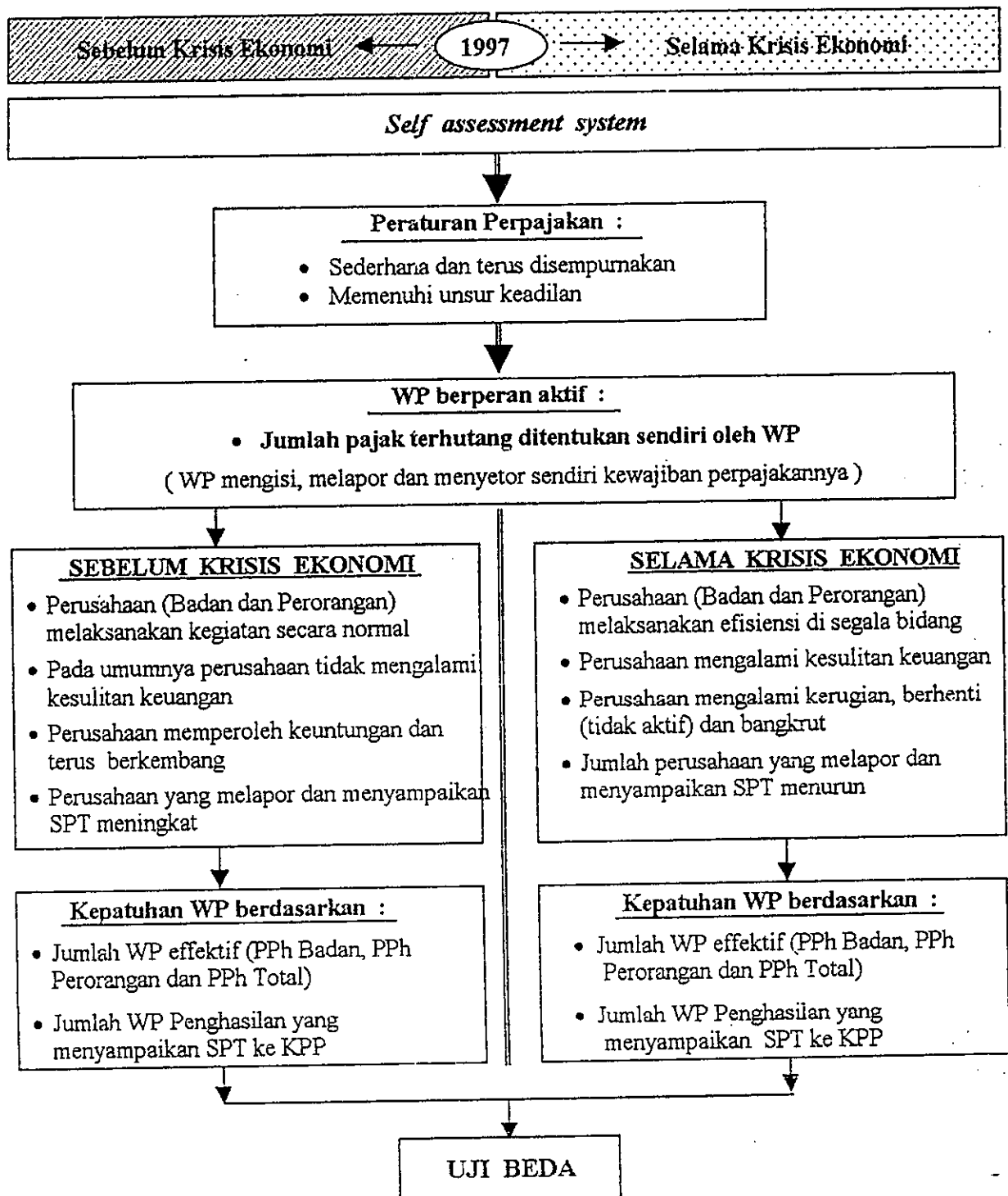
mempertahankan operasinya selama krisis pada umumnya perusahaan (WP) melakukan efisiensi diberbagai bidang, antara lain melalui *tax planning* atau merubah pola investasi / operasinya. Sementara itu perusahaan yang mengalami kesulitan keuangan mengajukan penundaan / keringanan pajaknya, sedangkan yang mengalami kerugian terus menerus terpaksa menghentikan operasinya sehingga menjadi WP yang tidak efektif.

Kondisi tersebut dapat mempengaruhi jumlah WP yang mendaftarkan diri sebagai WP untuk menjadi WP yang efektif maupun jumlah WP yang menyampaikan SPT-nya ke KPP, sehingga akan menurunkan tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya.

Dalam penelitian ini akan dilakukan uji beda tingkat kepatuhan WP sebelum dan selama krisis ekonomi dengan kerangka pemikiran teoritis yang digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 2.1

KERANGKA PEMIKIRAN TEORITIS TENTANG KEPATUHAN WAJIB PAJAK
SEBELUM DAN SELAMA KRISIS EKONOMI



2.4. Perumusan Hipotesis

Atas dasar kerangka pemikiran teoritis di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

1. Tingkat kepatuhan WP PPh Badan selama krisis ekonomi menurun dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi.
2. Tingkat kepatuhan WP PPh Orang Pribadi selama krisis ekonomi menurun dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi.
3. Tingkat kepatuhan WP PPh secara total (WP PPh Badan dan WP PPh Orang Pribadi) selama krisis ekonomi menurun dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Jenis dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan dari setiap KPP di wilayah Kantor Wilayah (Kanwil) VIII DJP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Kanwil VIII DJP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta membawahi 15 KPP yang melayani WP diseluruh wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta.

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, masing-masing KPP harus menyampaikan Laporan Pengolahan SPT Tahunan PPh dan PPh Ps. 21 kepada Kepala Kanwil VIII DJP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta setiap Triwulan, paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Sedangkan Kanwil VIII DJP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta melaporkan untuk seluruh KPP kepada Kepala Pusat Data dan Informasi Perpajakan (PDIP) di Jakarta, paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Laporan - laporan tersebut antara lain memuat data mengenai :

- a. Jumlah WP efektif masing – masing KPP.
- b. Jumlah SPT yang diterima oleh masing – masing KPP (jumlah WP yang memasukkan SPT ke masing - masing KPP).

Daftar KPP – KPP di Kanwil VIII DJP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta per 31 Desember 2000 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

TABEL 3.1

DAFTAR KPP DI WILAYAH KANWIL VIII DJP JATENG DAN D.I.
YOGYAKARTA PER 31 DESEMBER 2000

No.	K P P	Kode
1	Tegal	501
2	Pekalongan	502
3	Semarang Barat	503
4	Semarang Timur	504
5	Salatiga	505
6	Kudus	506
7	Pati	507
8	Semarang Selatan	508
9	Purwokerto	521
10	Cilacap	522
11	Kebumen	523
12	Magelang	524
13	Klaten	525
14	Surakarta	526
15	Yogyakarta	541

Sumber : Laporan Kanwil VIII DJP yang diolah.

3.2. Populasi dan Prosedur Pemilihan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah KPP-KPP di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, yang seluruhnya berjumlah 15. Sampel dalam penelitian ini mengambil seluruh KPP yang menerima SPT dan penyetoran pajak dari WP PPh Badan maupun PPh Perorangan yang berdomisili di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta selama periode tahun 1995 sampai dengan tahun 2000 untuk tahun pajak 1994 sampai dengan 1999. KPP-KPP di lingkungan Kanwil VIII DJP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta dipilih sebagai sampel penelitian selain pertimbangan kepraktisan, mutasi WP antar Kanwil maupun antar KPP tidak terlalu tinggi. Sedangkan periode tahun 1995 s.d 2000 dipilih sebagai periode penelitian karena krisis ekonomi yang terjadi sejak bulan Juli 1997 pengaruhnya terhadap dunia usaha (WP) masih terasa sampai saat penelitian ini. Hasil usaha tahun pajak 1997 (saat timbulnya krisis) akan tercermin dalam SPT Tahunan WP yang disampaikan dalam tahun 1998. Dengan demikian, tahun pajak 1994 s.d 1996 merupakan periode penelitian sebelum krisis, dan tahun pajak 1997 s.d 1999 merupakan periode penelitian selama krisis ekonomi.

3.3. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh Laporan Triwulanan dan Laporan Tahunan Pajak dari seluruh KPP di wilayah Kanwil VIII DJP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta, dilaksanakan dengan observasi langsung ke Bidang Informasi dan Administrasi

Perpajakan (IAP) Kanwil VIII DJP Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Selanjutnya untuk kelengkapan data penelitian, informasi dan data lainnya diperoleh dari Laporan Triwulanan Pengolahan SPT dari masing-masing KPP.

Data yang diperoleh dikelompokkan menjadi 2 kelompok, yaitu :

- a. Jumlah WP efektif dan jumlah WP yang memasukkan SPT pada masing-masing KPP untuk tahun pajak 1994, 1995, dan 1996 untuk kelompok sebelum krisis ekonomi.
- b. Jumlah WP efektif dan jumlah WP yang memasukkan SPT pada masing-masing KPP untuk tahun pajak 1997, 1998, dan 1999 untuk kelompok selama krisis ekonomi.

Selanjutnya data-data tersebut dirinci dalam klasifikasi PPh Badan dan PPh Perorangan untuk masing-masing KPP.

3.4. Definisi Operasional dan Identifikasi Variabel

Definisi operasional variabel dalam penelitian ini adalah :

1. Kepatuhan WP : Intensitas WP dalam mengisi, menyampaikan / melaporkan SPT Tahunan serta menyetor pajak yang terhutang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Tingkat kepatuhan WP dihitung sesuai dengan rumusan yang digunakan oleh DJP yaitu rasio antara SPT masuk dengan SPT yang dikirim, atau dengan membandingkan WP yang memasukkan SPT dengan WP efektif.

2. WP Efektif : WP terdaftar di KPP (mempunyai NPWP) yang masih aktif melaksanakan kegiatan usahanya dalam suatu tahun atau bagian tahun pajak sehingga wajib menyampaikan SPT. Dalam hal ini tidak termasuk WP yang Non Efektif dan WP yang sudah melapor ke KPP karena pindah wilayah, bubar/likuidasi, berhenti beroperasi dan WP yang berdasarkan penelitian KPP diketahui sudah tidak aktif melaksanakan kegiatannya.
3. SPT Masuk : Jumlah SPT Tahunan yang disampaikan oleh para WP ke KPP sesuai dengan batas waktu yang ditentukan. Dalam hal ini tidak termasuk SPT dari WP yang memohon penundaan atau pembetulan tetapi disampaikan terlambat melewati batas waktu yang ditentukan.
4. Krisis Ekonomi : Krisis yang terjadi di Indonesia sejak pertengahan Juli 1997 yang ditandai dengan melemahnya nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS sehingga mempengaruhi kegiatan dunia usaha (para Wajib Pajak).

Dengan berlakunya *self assessment system*, maka intensitas WP dalam mengambil, mengisi, dan menyerahkan SPT serta menyetor pajak terhutangya mencerminkan tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Dari segi fiskus (DJP), kepatuhan WP diidentifikasi dan diukur dengan jumlah WP yang memasukkan SPT ke KPP dibandingkan dengan jumlah WP efektif atau jumlah SPT yang diterima KPP dibandingkan dengan jumlah WP SPT yang dikirim.

Pengukuran tingkat kepatuhan WP dalam penelitian ini menggunakan cara yang sama dengan pengukuran kepatuhan WP yang digunakan oleh DJP dalam Laporan Tahunannya khususnya mengenai aspek perpajakan.

Pengukuran tersebut akan menunjukkan bahwa makin besar jumlah WP yang memasukkan SPT ke KPP mencerminkan tingkat kepatuhan WP yang makin tinggi, demikian pula sebaliknya. Pengukuran tingkat kepatuhan WP tersebut dapat dijelaskan dalam tabel berikut ini :

TABEL 3.2
IDENTIFIKASI PENGUKURAN TINGKAT KEPATUHAN WP

No.	Jenis Variabel	Definisi	Skala Pengukuran	Bagaimana Diukur
1.	SPT Masuk atau WP yang menyampaikan SPT	SPT yang diterima oleh KPP dari WP Penghasilan Badan dan WP Penghasilan Perorangan sampai dengan akhir tahun batas waktu penyampaian SPT atau WP yang menyampaikan SPT ke KPP	Rasio	Total SPT PPh Badan dan SPT PPh Perorangan yang diterima oleh masing-masing KPP sampai dengan akhir tahun batas waktu penyampaian SPT. Jumlah tersebut sama dengan jumlah WP yang memasukkan SPT ke KPP
2.	WP Efektif	WP terdaftar di KPP yang pada suatu periode tahun pajak aktif melaksanakan kegiatan usahanya baik dalam bentuk badan maupun perorangan, sehingga mempunyai kewajiban menyampaikan SPT ke KPP sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rasio	Total WP PPh Badan dan WP PPh Perorangan yang terdaftar sebagai WP Efektif pada masing-masing KPP. Jumlah tersebut sama dengan jumlah blanko SPT yang dikirim oleh KPP ke masing-masing WP
3.	Kepatuhan WP	Intensitas WP dalam mengisi dan menyampaikan SPT ke KPP serta menyetor pajak terutang-nya sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Rasio	Jumlah WP yang memasukkan SPT ke KPP (SPT masuk) dibandingkan dengan jumlah WP Efektif (blanko SPT yang dikirim kepada masing-masing WP) : $\frac{\text{SPT masuk}}{\text{WP Efektif}}$

3.5. Teknik Analisis

Setelah tingkat kepatuhan sebelum dan selama krisis ekonomi diketahui, langkah selanjutnya adalah melakukan pengujian hipotesis.

Teknik statistik yang digunakan adalah uji beda dua rata-rata berpasangan (*paired difference test of two means* atau *paired observation*) untuk sampel kecil (dimana $n < 30$). Menurut Lukas Setia Atmaja (1997, h. 278) teknik uji ini tepat digunakan untuk pengujian "before-after" dan "with-without".

Dengan memperhatikan pengaruh krisis ekonomi tahun 1997 terhadap kepatuhan WP, secara umum dapat ditarik hipotesis bahwa tingkat kepatuhan WP selama krisis ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan WP sebelum terjadi krisis ekonomi. Hipotesa tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut :

- Ho : Tingkat kepatuhan WP selama krisis ekonomi identik atau tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.
- Ha : Tingkat kepatuhan WP selama krisis ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.

Menurut Haryono (1995, h. 109) untuk merumuskan hipotesis nol (H_0) dan hipotesis alternatif (H_a) untuk uji dua arah, secara statistik adalah sebagai berikut :

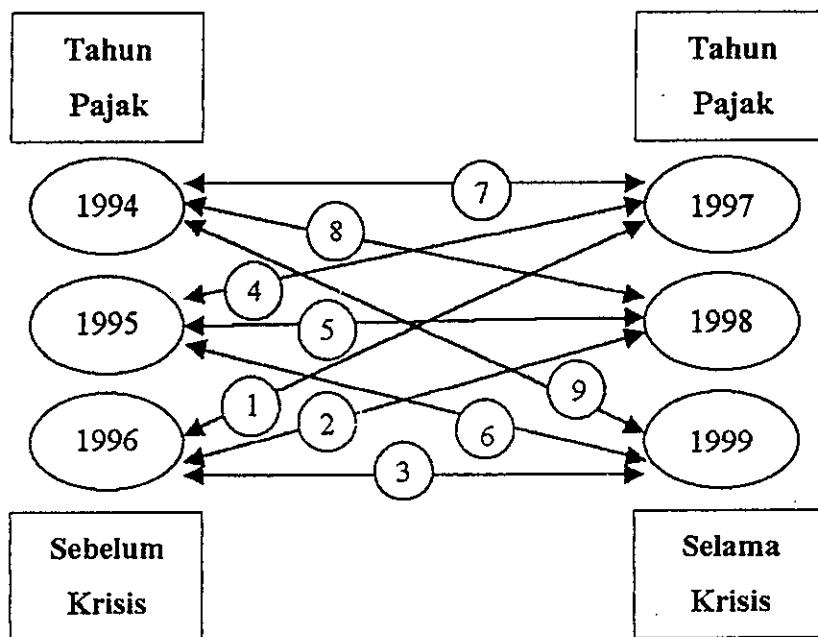
$$\boxed{H_0 : D \geq 0} \quad \text{dan} \quad \boxed{H_a : D < 0} \quad (1)$$

Dimana D = perbedaan rata-rata kepatuhan WP selama krisis minus sebelum krisis.

Untuk menguji bahwa H_a diterima atau ditolak, dilaksanakan uji beda dua rata-rata berpasangan dengan kombinasi pasangan data seperti digambarkan sebagai berikut :

GAMBAR 3.1

UJI BEDA DUA RATA-RATA BERPASANGAN



Uji beda dua rata-rata berpasangan antara data periode tahun pajak 1994, 1995 dan 1996 (sebelum krisis ekonomi) dan tahun pajak 1997, 1998 dan 1999 (selama krisis ekonomi) dapat digambarkan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan tahun pertama sebelum krisis ekonomi (1996) dengan tingkat kepatuhan tahun pertama selama krisis ekonomi (1997).
2. Tingkat kepatuhan tahun pertama sebelum krisis ekonomi (1996) dengan tingkat kepatuhan tahun kedua selama krisis ekonomi (1998).

3. Tingkat kepatuhan tahun pertama sebelum krisis ekonomi (1996) dengan tingkat kepatuhan tahun ketiga selama krisis ekonomi (1999).
4. Tingkat kepatuhan tahun kedua sebelum krisis ekonomi (1995) dengan tingkat kepatuhan tahun pertama selama krisis ekonomi (1997).
5. Tingkat kepatuhan tahun kedua sebelum krisis ekonomi (1995) dengan tingkat kepatuhan tahun kedua selama krisis ekonomi (1998).
6. Tingkat kepatuhan tahun kedua sebelum krisis ekonomi (1995) dengan tingkat kepatuhan tahun ketiga selama krisis ekonomi (1999).
7. Tingkat kepatuhan tahun ketiga sebelum krisis ekonomi (1994) dengan tingkat kepatuhan tahun pertama selama krisis ekonomi (1997).
8. Tingkat kepatuhan tahun ketiga sebelum krisis ekonomi (1994) dengan tingkat kepatuhan tahun kedua selama krisis ekonomi (1998).
9. Tingkat kepatuhan tahun ketiga sebelum krisis ekonomi (1994) dengan tingkat kepatuhan tahun ketiga selama krisis ekonomi (1999).

Hasil uji beda dua rata-rata berpasangan seperti tersebut di atas akan mendukung analisis tingkat kepatuhan WP sebelum dan selama krisis ekonomi.

Dalam pegujian tersebut, dimana penentuan Z - hitung (dengan asumsi Z - hitung sama dengan nilai t hitung) dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut :

Pertama : Menentukan perbedaan rata-rata sampel dengan rumus :

$$\bar{d} = \frac{\sum d}{n} \quad (2)$$

Kedua : Menentukan standar deviasi atas perbedaan antar setiap pasangan pada sampel dengan rumus :

$$Sd = \sqrt{\frac{\Sigma (d - \bar{d})^2}{n - 1}} \quad (3)$$

Ketiga : Menentukan standar error atas perbedaan rata-rata sampel dengan rumus :

$$\bar{Sd} = \frac{Sd}{\sqrt{n}} \quad (4)$$

Keempat : Menentukan nilai t hitung dengan cara membagi standar deviasi atas setiap sampel dengan standar error atas perbedaan rata-rata sampel, atau :

$$t = z = \frac{Sd}{\bar{Sd}} \quad (5)$$

Setelah nilai Z hitung dapat ditentukan, maka dibandingkan dengan Z tabel, dengan menggunakan tingkat signifikansi (α) = 0,05.

Perhitungan-perhitungan statistik tersebut di atas akan menggunakan paket program SPSS. Hipotesis alternatif akan diterima jika nilai probabilitas (p) atau *Sig. (2 tailed)* lebih kecil dari tingkat signifikansi (α) yang digunakan dalam

penelitian, yaitu 0,05. Probabilitas (p) untuk *Sig. (1 tailed)* ditentukan dengan *Sig. (2 tailed)* : 2 (lihat Singgih, 2000 h. 329).

Pengujian beda rata-rata berpasangan didasarkan pada asumsi bahwa data sampel berdistribusi normal. Oleh karena itu, sebelum pengujian dilaksanakan, terlebih dulu dilakukan pengujian distribusi normal terhadap data penelitian dengan menggunakan uji *goodness of fit*. Jika hasilnya menunjukkan p (*Asymp. Sig*) lebih besar dari tingkat signifikansi (α) dalam penelitian ini (0,05) maka data berdistribusi normal. Untuk data yang tidak berdistribusi normal, pengujian akan menggunakan teknik uji peringkat bertanda *Wilcoxon* dengan tingkat signifikansi (α) = 0,05.

Langkah pengujiannya adalah :

1. Menghitung perbedaan (D) antara kepatuhan selama krisis dan kepatuhan sebelum krisis.
2. Menentukan nilai mutlak dari (D) dari peringkat terkecil ke peringkat terbesar.
3. Memberikan tanda positif dan negatif sesuai dengan hasil perhitungan pada nilai D .
4. Menghitung jumlah peringkat bertanda positif (T^+) dan jumlah peringkat bertanda negatif (T^-).

Keputusan uji peringkat akan menolak H_0 jika nilai probabilitas (p) lebih rendah dari tingkat signifikansi (α) 0,05. Pelaksanaan perhitungan tersebut juga menggunakan paket program SPSS.

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pembahasan dan analisis hasil penelitian dilakukan mulai dari tabulasi data, uji distribusi data, uji hipotesis dan analisis hasil penelitian. Analisis mengenai hasil penelitian meliputi Kepatuhan WP PPh Badan, Kepatuhan WP PPh Orang Pribadi dan Kepatuhan WP PPh Total. Dalam analisis tersebut meliputi juga perbandingan antara Kepatuhan WP sebelum krisis ekonomi dan Kepatuhan WP selama krisis ekonomi.

4.1. Tabulasi Data Penelitian

Untuk membantu analisa hasil penelitian, data penelitian dikelompokkan dalam beberapa tabel yang terdiri dari data tentang :

- a. Data jumlah WP Effektif PPh Badan tahun pajak 1994 sampai dengan 1999 untuk masing-masing KPP.
- b. Data jumlah WP Effektif PPh Orang Pribadi tahun pajak 1994 sampai dengan 1999 untuk masing-masing KPP.
- c. Data jumlah WP Effektif PPh Total (PPh Badan dan PPh Orang Pribadi) tahun pajak 1994 sampai dengan 1999 untuk masing-masing KPP.

- d. Data jumlah WP PPh Badan yang memasukkan SPT tahun pajak 1994 sampai dengan 1999 untuk masing-masing KPP.
- e. Data jumlah WP PPh Orang Pribadi yang memasukkan SPT tahun pajak 1994 sampai dengan 1999 untuk masing-masing KPP.
- f. Data jumlah WP PPh Total (PPh Badan dan PPh Orang Pribadi) yang memasukkan SPT tahun pajak 1994 sampai dengan 1999 untuk masing-masing KPP.
- g. Tingkat Kepatuhan WP PPh Badan tahun pajak 1994 sampai dengan 1999 masing-masing KPP.
- h. Tingkat Kepatuhan WP PPh Orang Pribadi tahun pajak 1994 sampai dengan 1999 masing-masing KPP.
- i. Tingkat Kepatuhan WP PPh Total (PPh Badan dan PPh Orang Pribadi) tahun pajak 1994 sampai dengan 1999 masing-masing KPP.

Tabulasi data-data tersebut dapat dilihat pada lampiran 1.

4.2. Uji Distribusi Data Penelitian

Sebagaimana telah dikemukakan pada bab 3, sebelum dilakukan pengujian beda dua rata-rata berpasangan, terlebih dulu dilakukan uji distribusi normal atas data penelitian yaitu data tingkat kepatuhan WP. Jika hasil pengujian menyatakan bahwa data berdistribusi normal, maka data tingkat kepatuhan dapat diuji dengan uji

beda dua rata-rata berpasangan. Namun jika hasil pengujian menyatakan bahwa data tidak berdistribusi normal maka pengujian tingkat kepatuhan dilakukan dengan uji non parametrik.

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan *Kolmogorov-Smirnov* untuk menguji ketepatan distribusi suatu variabel dengan distribusi normal. Alasan menggunakan analisis uji *Kolmogorov-Smirnov* dikarenakan menurut Singgih (2000, h. 311) uji *Kolmogorov-Smirnov* dapat digunakan untuk uji keselarasan data (*Goodness of Fit*) untuk data yang minimal berskala ordinal, sedangkan data yang diolah dalam penelitian ini berskala rasio sehingga dapat menggunakan uji *Kolmogorov-Smirnov* dalam pengujian normalitas data atau uji keselarasan data, (lihat juga Ghozali, 2001, h. 6)

Pengujian ini menggunakan hipotesis :

$H_0 : F(x) = F_0(x)$, dimana $F(x)$ adalah fungsi distribusi populasi yang diwakili oleh sampel dan $F_0(x)$ adalah fungsi distribusi suatu populasi berdistribusi normal.

$H_1 : F(x) \neq F_0(x)$ atau distribusi populasi tidak normal.

Kriteria yang digunakan berdasarkan probabilitas :

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Sebagaimana disebutkan dalam lampiran 2, hasil pengujian secara statistik adalah sebagai berikut :

TABEL 4.1
 HASIL UJI NORMALITAS DATA
 TINGKAT KEPATUHAN WP PPh BADAN

VARIABEL	<i>ASYMP.SIG (2-TAILED)</i>
T -3	0.582
T -2	0.941
T -1	0.620
T +1	0.763
T +2	0.945
T +3	0.615

Sumber : Data penelitian yang diolah.

TABEL 4.2
 HASIL UJI NORMALITAS DATA
 TINGKAT KEPATUHAN WP PPh ORANG PRIBADI

VARIABEL	<i>ASYMP.SIG (2-TAILED)</i>
T -3	0.903
T -2	0.799
T -1	1.000
T +1	0.998
T +2	0.999
T +3	0.946

Sumber : Data penelitian yang diolah.

TABEL 4.3
HASIL UJI NORMALITAS DATA
TINGKAT KEPATUHAN WP PPh TOTAL

VARIABEL	<i>ASYMP.SIG (2-TAILED)</i>
T -3	0.851
T -2	0.879
T -1	0.895
T +1	0.999
T +2	1.000
T +3	0.733

Sumber : Data penelitian yang diolah.

Dari tabel di atas dapat dikatakan bahwa hasil pengujian yang tampak pada kolom *asymptotic significance* untuk semua variabel berada di atas 0.05, sehingga hipotesa H_0 diterima, dengan demikian berarti distribusi populasi data yang digunakan adalah normal.

4.3. Analisis Hasil Penelitian

Analisis hasil penelitian terdiri dari uji hipotesis yang berhubungan dengan tingkat kepatuhan WP PPh Badan, WP PPh Orang Pribadi dan WP PPh Total (PPh Badan dan PPh Orang Pribadi) dalam dua periode yaitu sebelum krisis ekonomi dan selama krisis ekonomi.

4.3.1. Analisis Kepatuhan WP PPh Badan

Tolok ukur tingkat kepatuhan WP PPh Badan yang digunakan adalah rasio antara jumlah WP PPh Badan yang memasukkan SPT dengan jumlah WP Effektif PPh Badan. Adapun hasil pengujian perbedaan tingkat kepatuhan WP PPh Badan sebelum krisis ekonomi dengan selama krisis ekonomi adalah sebagai berikut :

Pengujian ini menggunakan hipotesis :

$H_0 : F(x) =$ Kedua rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh Badan selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.

$H_1 : F(x) =$ Kedua rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh Badan mengalami penurunan selama krisis ekonomi.

Kriteria yang digunakan berdasarkan probabilitas :

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Dari hasil uji statistik sebagaimana dicantumkan dalam lampiran 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 4.4
HASIL UJI BEDA KEPATUHAN WP PPh BADAN

Paired Samples Test

	t hitung	df	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
T +1 - T - 1	0.307	14	0.765	0.3825
T +1 - T - 2	- 0.658	14	0.521	0.2605
T +1 - T - 3	0.263	14	0.796	0.3980
T +2 - T - 1	- 0.090	14	0.930	0.4650
T +2 - T - 2	- 1.211	14	0.246	0.1230
T +2 - T - 3	0.085	14	0.934	0.4670
T +3 - T - 1	- 0.189	14	0.853	0.4265
T +2 - T - 2	- 1.112	14	0.285	0.1425
T +3 - T - 3	0.038	14	0.970	0.4850

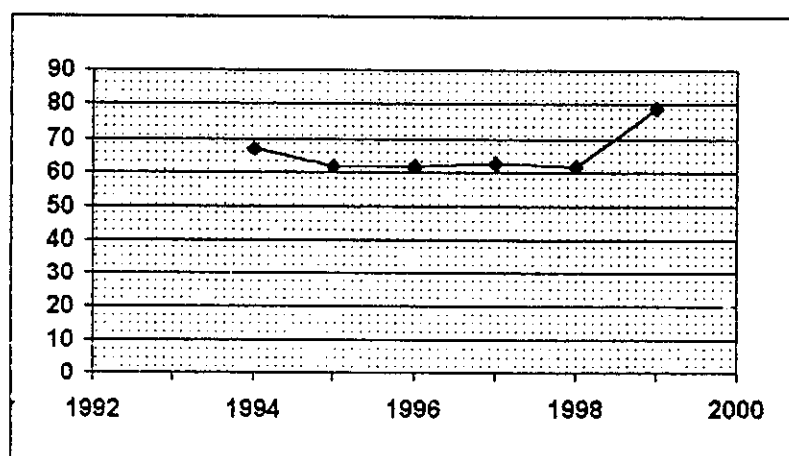
Sumber : Data penelitian yang diolah.

Untuk menguji apakah krisis ekonomi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP PPh Badan dapat dilihat pada tabel 4.4, yang menyajikan hasil uji beda rata-rata tingkat kepatuhan kombinasi tiga tahun sebelum krisis dengan tiga tahun selama krisis. Dalam pengujian ini digunakan uji dua sisi, tetapi dalam hipotesis yang disusun oleh peneliti menggunakan uji satu sisi. Dari hasil uji t satu sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* $n - 1$ (14), maka diperoleh t tabel ($t_{0,05, 14}$) sebesar 1.761. Karena dalam penelitian ini hipotesis yang disusun adalah hipotesis satu arah yaitu adanya penurunan maka besarnya t tabel adalah - 1.761. Dari kesembilan pasangan uji beda diperoleh nilai mutlak t hitung yang kurang dari nilai mutlak t tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 yang berbunyi : Kedua rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh Badan

selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan kepatuhan sebelum krisis ekonomi diterima. Karena uji t test yang dilakukan adalah uji satu sisi, sedangkan hasil dari pengujian komputerisasi menggunakan uji dua sisi maka untuk memperoleh *P-value* (*Sig. 1 tailed*), *P-value* (*Sig. 2 tailed*) dibagi dua. Jika hasil nilai *P-value* (*Sig. 1 tailed*) kurang dari 0.05, maka H_0 ditolak dan sebaliknya. Jika dilihat dari nilai *P-value* (*Sig. 1 tailed*), terlihat bahwa hasil perhitungan statistik di atas 0,05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 diterima. Jika dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh Badan dari tahun pajak 1994 sampai tahun 1999 seperti gambar 4.1, terlihat bahwa tingkat kepatuhan WP PPh Badan justru mempunyai *trend* menurun, kemudian naik di tahun 1999.

GAMBAR 4.1

TREND RATA-RATA TINGKAT KEPATUHAN WP PPh BADAN
TAHUN PAJAK 1994 SAMPAI 1999



Sumber : Data penelitian yang diolah.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan WP PPh Badan sebelum dan selama krisis ekonomi tidak terjadi perbedaan secara statistik, walaupun mempunyai kecenderungan menurun.

Hal tersebut diperkuat dengan uji beda rata-rata tiga tahun sebelum krisis dengan rata-rata tiga tahun selama krisis (lihat lampiran 3). Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.5 dibawah ini.

TABEL 4.5

HASIL UJI BEDA RATA-RATA KEPATUHAN WP PPh BADAN
SEBELUM DAN SELAMA KRISIS

Paired Samples Test

	t	df	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
SELAMA KRISIS – SEBELUM KRISIS	-0.213	14	0.834	0.4170

Sumber : Data penelitian yang diolah.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan WP PPh Badan sebelum dan selama krisis adalah tidak ada perbedaan, karena nilai mutlak t hitung (-0.213) lebih kecil dari nilai mutlak t tabel (-1.761) atau nilai dari P – value (Sig. 1-tailed) adalah sebesar 0.4170, terlihat di atas 0,05, sehingga Ho diterima.

4.3.2. Analisis Hasil Penelitian Kepatuhan WP PPh Orang Pribadi

Tolok ukur tingkat kepatuhan WP PPh Orang Pribadi yang digunakan adalah rasio antara jumlah WP PPh Orang Pribadi yang memasukkan SPT dengan jumlah WP Effektiv PPh Orang Pribadi. Adapun hasil pengujian perbedaan tingkat

kepatuhan WP PPh Orang Pribadi sebelum krisis ekonomi dengan selama krisis ekonomi adalah sebagai berikut :

Pengujian ini menggunakan hipotesis :

$H_0 : F(x) =$ Kedua rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh Orang Pribadi selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.

$H_1 : F(x) =$ Kedua rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh Orang Pribadi mengalami penurunan selama krisis ekonomi.

Kriteria yang digunakan berdasarkan probabilitas :

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H_0 diterima
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H_0 ditolak

Dari hasil uji statistik sebagaimana dicantumkan dalam lampiran 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 4.6

HASIL UJI BEDA RATA-RATA KEPATUHAN WP PPh ORANG PRIBADI
Paired Samples Test

	t hitung	df	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
T +1 - T - 1	-3.254	14	0.006	0.0030
T +1 - T - 2	-6.252	14	0.000	0.0000
T +1 - T - 3	-0.676	14	0.510	0.2550
T +2 - T - 1	-4.416	14	0.001	0.0005
T +2 - T - 2	-7.711	14	0.000	0.0000
T +2 - T - 3	-1.265	14	0.226	0.1130
T +3 - T - 1	-4.054	14	0.001	0.0005
T +2 - T - 2	-6.229	14	0.000	0.0000
T +3 - T - 3	-1.585	14	0.135	0.0675

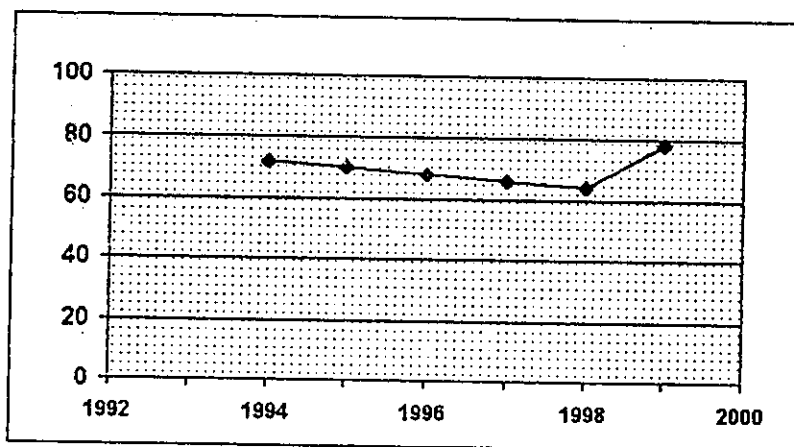
Sumber : Data penelitian yang diolah.

Untuk menguji apakah krisis ekonomi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP PPh Orang Pribadi dapat dilihat pada tabel 4.6, yang menyajikan hasil uji beda rata-rata tingkat kepatuhan kombinasi tiga tahun sebelum krisis dengan tiga tahun selama krisis. Dalam pengujian ini digunakan uji dua sisi, tetapi dalam hipotesis yang disusun oleh peneliti menggunakan uji satu sisi. Dari hasil uji t satu sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* $n - 1$ (14), maka diperoleh t tabel ($t_{0,05, 14}$) sebesar 1.761. Karena dalam penelitian ini hipotesis yang disusun adalah hipotesis satu arah yaitu adanya penurunan maka besarnya t tabel adalah - 1.761. Dari kesembilan pasangan uji beda diperoleh nilai t hitung yang kurang dari nilai t tabel yaitu untuk pasangan uji beda satu tahun sebelum krisis dengan tahun ketiga selama krisis, dua tahun sebelum krisis dengan tahun ketiga selama krisis dan tiga tahun sebelum krisis dengan tahun ketiga selama krisis. Sedangkan pasangan uji beda yang lain diperoleh nilai mutlak t hitung yang lebih besar dibandingkan nilai mutlak t tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecuali pada pasangan t-1 / t+3, t-2 / t+3 dan t-3 / t+3 H_0 yang berbunyi : Kedua rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh Orang Pribadi selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi, ditolak. Karena uji t test yang dilakukan adalah uji satu sisi, sedangkan hasil dari pengujian komputerisasi menggunakan uji dua sisi maka untuk memperoleh P- value (*Sig. 1 tailed*), nilai dari P-value (*Sig. 2 tailed*) dibagi dua. Jika hasil nilai P-value (*Sig. 1 tailed*) kurang dari 0.05, maka H_0 ditolak dan sebaliknya. Jika dilihat dari nilai P-value (*Sig. 1 tailed*) terlihat bahwa hasil perhitungan statistik di atas 0,05, untuk pasangan t-1 / t+3, t-2 / t+3 dan t-3 / t+3, sedangkan untuk pasangan yang lainnya di

bawah 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Jika dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh Orang Pribadi dari tahun pajak 1994 sampai tahun 1999 seperti pada gambar 4.2, dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan WP PPh Orang Pribadi justru mempunyai *trend* menurun, kemudian naik di tahun 1999.

GAMBAR 4.2

TREND RATA-RATA TINGKAT KEPATUHAN WP PPh ORANG PRIBADI
TAHUN PAJAK 1994 SAMPAI 1999



Sumber : Data penelitian yang diolah.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan WP PPh Orang Pribadi selama krisis ekonomi mengalami penurunan.

Hal tersebut diperkuat dengan uji beda rata-rata tiga tahun sebelum krisis dengan rata-rata tiga tahun selama krisis (lihat lampiran 3). Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.7 di bawah ini.

TABEL 4.7
HASIL UJI BEDA RATA-RATA KEPATUHAN WP PPh ORANG PRIBADI
SEBELUM DAN SELAMA KRISIS

Paired Samples Test

	t	df	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
SELAMA KRISIS- SEBELUM KRISIS	-3.785	14	0.002	0.0010

Sumber : Data penelitian yang diolah.

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan WP PPh Orang Pribadi selama krisis ekonomi mengalami penurunan, karena nilai mutlak t hitung (-3,785) lebih besar dari nilai mutlak t tabel (-1.761) atau nilai dari P-value (Sig. 1-tailed) adalah sebesar 0.0010, terlihat di bawah 0,05, sehingga Ho ditolak.

4.3.3. Analisis Hasil Penelitian Kepatuhan WP PPh Total

Tolok ukur tingkat kepatuhan WP PPh Total (WP PPh Badan dan WP PPh Orang Pribadi) yang digunakan adalah rasio antara jumlah WP PPh Total yang memasukkan SPT dengan jumlah WP Efektif PPh Total. Adapun hasil pengujian perbedaan tingkat kepatuhan WP PPh Total sebelum krisis ekonomi dengan selama krisis ekonomi adalah sebagai berikut :

Pengujian ini menggunakan hipotesis :

$H_0 : F(x) =$ Kedua rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh total selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.

H1 : F(x) = Kedua rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh total mengalami penurunan selama krisis ekonomi.

Kriteria yang digunakan berdasarkan probabilitas :

1. Jika probabilitas $> 0,05$ maka H0 diterima
2. Jika probabilitas $< 0,05$ maka H0 ditolak

Dari hasil uji statistik sebagaimana dicantumkan dalam lampiran 3 dapat dijelaskan sebagai berikut :

TABEL 4.8

HASIL UJI BEDA RATA-RATA KEPATUHAN WP PPh TOTAL

Paired Samples Test

	t hitung	df	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
T +1 - T - 1	-2.910	14	0.011	0.0055
T +1 - T - 2	-5.415	14	0.000	0.0000
T +1 - T - 3	-0.423	14	0.679	0.3395
T +2 - T - 1	-4.882	14	0.000	0.0000
T +2 - T - 2	-7.898	14	0.000	0.0000
T +2 - T - 3	-0.972	14	0.347	0.1735
T +3 - T - 1	-4.145	14	0.001	0.0005
T +2 - T - 2	-5.985	14	0.000	0.0000
T +3 - T - 3	-1.279	14	0.222	0.1110

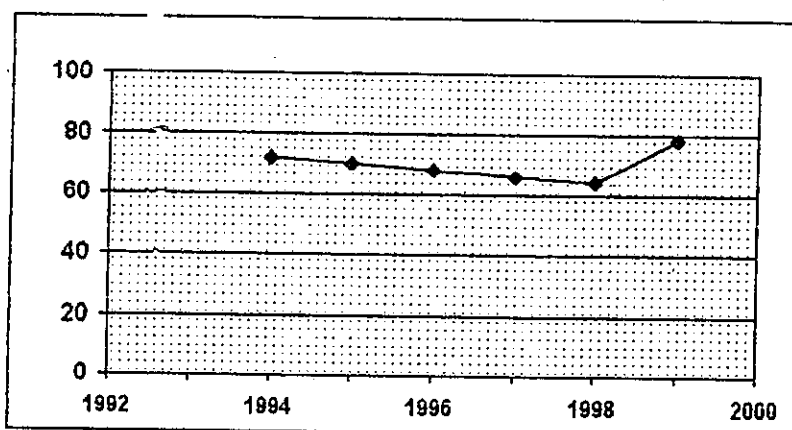
Sumber : Data penelitian yang diolah.

Untuk menguji apakah krisis ekonomi mempunyai pengaruh terhadap tingkat kepatuhan WP PPh secara total dapat dilihat pada tabel 4.8, yang menyajikan hasil uji beda rata-rata tingkat kepatuhan kombinasi tiga tahun sebelum krisis dengan tiga tahun selama krisis. Dalam pengujian ini digunakan uji dua sisi, tetapi dalam

hipotesis yang disusun oleh peneliti menggunakan uji satu sisi. Dari hasil uji t satu sisi dengan tingkat signifikansi $\alpha = 5\%$ dan *degree of freedom* $n - 1$ (14), maka diperoleh t tabel ($t_{0,05, 14}$) sebesar 1.761. Karena dalam penelitian ini hipotesis yang disusun adalah hipotesis satu arah yaitu adanya penurunan maka besarnya t tabel adalah -1.761 . Dari kesembilan pasangan uji beda diperoleh nilai t hitung yang kurang dari nilai t tabel yaitu untuk kombinasi uji beda satu tahun sebelum krisis dengan tahun ketiga selama krisis, dua tahun sebelum krisis dengan tahun ketiga selama krisis dan tiga tahun sebelum krisis dengan tahun ketiga selama krisis. Sedangkan kombinasi uji beda yang lain diperoleh nilai mutlak t hitung yang lebih besar dibandingkan nilai mutlak t tabel. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kecuali pasangan $t-1 / t+3$, $t-2 / t+3$ dan $t-3 / t+3$, H_0 yang berbunyi : Kedua rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh total selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan sebelum krisis ekonomi, ditolak. Karena uji t test yang dilakukan adalah uji satu sisi, sedangkan hasil dari pengujian komputerisasi menggunakan uji dua sisi maka untuk memperoleh *P-value* (*Sig. 1 tailed*), nilai dari *P-value* (*Sig. 2 tailed*) dibagi dua. Jika hasil nilai *P-value* (*Sig. 1 tailed*) kurang dari 0.05, maka H_0 ditolak dan sebaliknya. Jika dilihat dari nilai *P-value* (*Sig. 1 tailed*) terlihat bahwa hasil perhitungan statistik di atas 0,05, untuk pasangan $t-1 / t+3$, $t-2 / t+3$ dan $t-3 / t+3$; sedangkan untuk pasangan yang lainnya di bawah 0.05. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa H_0 ditolak. Jika dilihat dari rata-rata tingkat kepatuhan WP PPh Total dari tahun pajak 1994 sampai tahun 1999 seperti pada gambar 4.3 dapat dilihat bahwa tingkat kepatuhan WP PPh Total justru mempunyai *trend* menurun, kemudian naik di tahun 1999.

GAMBAR 4.3

TREND RATA-RATA TINGKAT KEPATUHAN WP PPh TOTAL
TAHUN PAJAK 1994 SAMPAI 1999



Sumber : Data penelitian yang diolah.

Dari keterangan di atas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan WP PPh Total selama krisis ekonomi mengalami penurunan.

Hal tersebut diperkuat dengan uji beda rata-rata tingkat kepatuhan tiga tahun sebelum krisis dengan rata-rata tingkat kepatuhan tiga tahun selama krisis (lihat lampiran 3). Hasil perhitungannya dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini.

TABEL 4.9

HASIL UJI BEDA RATA-RATA KEPATUHAN WP PPh TOTAL
SEBELUM DAN SELAMA KRISIS

Paired Samples Test

	t	df	Sig. (2-tailed)	Sig. (1-tailed)
SELAMA KRISIS - SEBELUM KRISIS	-3.050	14	0.009	0.0045

Sumber : Data penelitian yang diolah.

OPT-POSTAK-UNDIP

Dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa tingkat kepatuhan WP PPh total selama krisis mengalami penurunan, karena nilai mutlak t hitung (-3,050) lebih besar dari nilai mutlak t tabel (-1.761) atau nilai dari P -value (*Sig. 1-tailed*) adalah sebesar 0.0045, terlihat di bawah 0,05, sehingga H_0 ditolak.

4.4. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil penelitian terhadap tingkat kepatuhan WP PPh Badan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP PPh Badan selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi. Hal tersebut kemungkinan disebabkan karena tingkat kesadaran kepada aturan atau ketentuan suatu organisasi baik berbentuk perusahaan, yayasan atau bentuk usaha lainnya lebih tinggi dari pada tingkat kesadaran yang sama pada perorangan. Terkait dengan adanya bentuk badan hukum suatu perusahaan, maka tujuan, kegiatan dan sanksi-sanksi organisasi ditentukan secara jelas dalam anggaran dasar dan ketentuan organisasi lainnya mengingat adanya pertanggungjawaban kepada pemilik atau para pemegang saham. Kesimpulan penelitian tersebut di atas mendukung hasil penelitian sebelumnya oleh Kiryanto (1998) yang menyimpulkan bahwa penerapan Struktur Pengendalian Intern (SPI) mempunyai hubungan dan berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP Penghasilan. Penelitian tersebut mengambil sampel perusahaan-perusahaan manufaktur yang berkewajiban menyampaikan SPT PPh Badan.

Untuk tingkat kepatuhan WP PPh Perorangan, hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP PPh Perorangan selama krisis ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi. Hal tersebut dimungkinkan karena WP PPh Perorangan pada umumnya mempunyai tingkat kesadaran yang rendah kepada suatu aturan atau ketentuan yang berlaku. Tujuan dan kegiatan-kegiatan usahanya ditentukan sendiri sehingga aturan dan sanksinya juga tidak jelas. Oleh karena itu tingkat kepatuhannya kepada kewajiban untuk menyampaikan SPT ke KPP juga mudah dipengaruhi oleh perilaku individu dan lingkungan.

Hasil penelitian terhadap tingkat kepatuhan WP PPh secara total (WP Badan dan PPh Perorangan) menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP PPh secara total selama krisis ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi. Hasil penelitian tersebut sama dengan hasil penelitian tingkat kepatuhan pada WP PPh Perorangan. Hal ini dimungkinkan karena jumlah WP PPh Perorangan selama periode penelitian rata-rata meliputi 69 % dari total WP, sehingga hasil penelitian tingkat kepatuhan WP PPh Perorangan pengaruhnya cukup signifikan terhadap hasil penelitian tingkat kepatuhan WP PPh secara total.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

Sebagai bagian akhir dari hasil penelitian ini akan dikemukakan kesimpulan dan saran yang terdiri dari kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran kepada pihak-pihak yang berkepentingan.

5.1. Kesimpulan

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis apakah krisis ekonomi mempunyai dampak negatif terhadap WP sehingga menurunkan tingkat kepatuhan WP dalam memenuhi kewajibannya. Populasi dan sekaligus sampel dalam penelitian ini adalah 15 KPP di wilayah Jawa Tengah dan D.I. Yogyakarta. Penentuan tingkat kepatuhan WP dalam penelitian ini sama dengan yang digunakan oleh DJP yaitu dari rasio antara WP yang memasukkan SPT ke KPP dengan WP Efektif.

Dari hasil analisis seperti telah diuraikan pada bab sebelumnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Tingkat kepatuhan WP PPh Badan selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.
2. Tingkat kepatuhan WP PPh Orang Pribadi selama krisis ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.
3. Tingkat kepatuhan WP PPh secara total selama krisis ekonomi mengalami penurunan dibandingkan dengan tingkat kepatuhan sebelum krisis ekonomi.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan tesis ini masih terdapat kelemahan-kelemahan yang perlu mendapat perbaikan. Hal tersebut antara lain disebabkan adanya keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian yaitu :

1. Assumsi bahwa para WP yang memasukkan SPT ke KPP telah melaksanakan *self assessment system* dalam memenuhi kewajiban perpajakannya yaitu melaporkan, mengisi dan menyampaikan SPT secara benar, lengkap dan jelas sehingga dapat diartikan WP telah memenuhi sebagian besar variabel kepatuhan WP sebagaimana disebutkan oleh E. Ellyani (1989) dan Novak (1989). Variabel kepatuhan lainnya yaitu ketepatan pembayaran pajak oleh WP tidak termasuk dalam penelitian ini karena pembayaran pajak oleh WP tergantung juga pada proses penerbitan SKP oleh KPP setelah SPT diterima dan diteliti oleh KPP.
2. Tingkat kepatuhan pajak yang diteliti adalah kepatuhan WP untuk Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan) dan Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPh Orang Pribadi) serta Pajak Penghasilan secara Total (PPh Badan dan PPh Orang Pribadi).
3. Walaupun krisis ekonomi dimulai bulan Juli 1997, periode penelitian tidak dapat dilakukan sejak Juli 1994 sampai dengan Juli 2000, karena yang diteliti adalah SPT Tahunan yang disampaikan oleh para WP pada setiap akhir tahun pajak. Oleh karena itu dalam penelitian ini periode sebelum krisis ekonomi dibatasi

denga tahun pajak 1994, 1995 dan 1996. Sedangkan periode selama krisis ekonomi dibatasi dengan tahun pajak 1997, 1998 dan 1999.

5.3. Saran

Sehubungan dengan hasil penelitian yang telah penulis simpulkan di atas, disarankan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengingat hasil penelitian yang menyebutkan bahwa tingkat kepatuhan WP PPh Badan sebelum dan selama krisis ekonomi tidak mengalami penurunan maka disamping usaha intensifikasi dan ekstensifikasi, pihak DJP melalui KPP dan Karikpa perlu meningkatkan kegiatan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan WP apakah WP telah menyampaikan SPT secara benar, lengkap dan jelas.
2. Terhadap WP PPh Orang Pribadi yang berdasarkan penelitian tingkat kepatuhannya mengalami penurunan selama krisis ekonomi, maka pihak DJP melalui KPP perlu meningkatkan usaha-usaha penyuluhan perpajakan agar para WP PPh Orang Pribadi menjadi WP yang patuh. Hal tersebut perlu dilakukan mengingat jumlah WP PPh Orang Pribadi rata-rata di atas 69 % dari total WP sehingga merupakan potensi bagi peningkatan penerimaan pajak, guna mendukung pencapaian Optimalisasi Penerimaan Negara (OPN).
3. Mengingat tingkat kepatuhan rata-rata WP PPh secara total masih rendah, maka DJP perlu mengevaluasi pengenaan sanksi kepada para WP efektif yang tidak memasukkan SPT ke KPP. Apakah sanksi yang ada sudah tepat atau dalam pelaksanaannya yang masih kurang tegas.

Untuk kegiatan penelitian dimasa yang akan datang, khususnya mengenai kepaualan WP di sarankan agar penelitian tersebut dikaitkan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi WP dalam menyampaikan SPT ke KPP mengingat para WP Efektif yang seharusnya menyampaikan SPT Tahunan ke KPP ternyata belum seluruhnya melaksanakan kewajibannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan penelitian tersebut diharapkan juga dapat diperoleh bukti empiris sejauh mana *self assessment system* telah dilaksanakan oleh para WP, khususnya dalam penyampaian atau pengiriman SPT Tahunan ke KPP, disamping merumuskan solusi atau pemecahannya..

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Budiarmanto, 1999. *Studi Evaluasi Kepatuhan Wajib Pajak Sebelum dan Sesudah Reformasi Perpajakan Tahun 1983*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Gajah Mada (tidak dipublikasikan).
- Andi VD, Igor M, Usmansyah, 2000. "Kajian Atas Pilihan Tax Ratio vs. Pertumbuhan Ekonomi". *Artikel Warta Pengawasan No. 25*, Januari, pp. 6-11.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 1999. *Buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan*. Jakarta, Indonesia.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 1999. *Buku Petunjuk Pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi*. Jakarta, Indonesia.
- Departemen Keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak, 2000. *Laporan Tahunan 2000*. Jakarta, Indonesia.
- Edy Suandi Hamid dan M.B. Hendri Anto, 2000. *Ekonomi Indonesia Memasuki Milenium III*, Yogyakarta, UII Press, 2000.
- Gunadi, 1999. *Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak*, Cetakan Pertama, Jakarta : Penerbit Abdi Tandur, 1999.
- Haryono Subiyakto, 1995. *Statistika (Inferen) untuk Bisnis*. Edisi ke 1, Yogyakarta : Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi, YKPN, 1995.
- Imam Ghozali, 2001. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Penerbit Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Kiryanto, 1998. *Pengaruh Penerapan Struktur Pengendalian Intern Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Memenuhi Kewajiban Pajak Penghasilannya*. Tesis Program Pasca Sarjana Magister Akuntansi Universitas Pajajaran (tidak dipublikasikan).

- Lukas Setia Atmaja, MSc, 1997. *Memahami Statistika Bisnis*, Edisi Pertama, Yogyakarta : Penerbit Andi, 1997.
- Mc. Leod, R.H. and R. Garnant, 1998. *East Asia in Crisis From Being Miracle to Needing One*, New York, NY Ront Ledge.
- National Economic Action Council, 1998. *National Economic Recovery Plan : Agenda For Action. Economic Planing Unit*, Prime Minister's Departement, Malaysia.
- Puxty, A.G., 1997. "Accounting Choice and The Theory of Crisis. The Case of Post Privatization British Telecom and British Gas", *Accounting Organizations, and Society*, 22 (7), 713 - 715.
- Republik Indonesia, 1994. *Undang - Undang No. 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta. Indonesia.
-, 2000. *Undang - Undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
-, 1994. *Undang - Undang No. 10 Tahun 1994 Tentang Pajak Penghasilan*, Jakarta. Indonesia.
-, 2000. *Undang - Undang No. 17 Tahun 2000 Tentang Perubahan Ketiga Atas UU No. 7 Tahun 1983 Tentang Pajak Penghasilan*.
- Robbins, Stephent P., 1996. *Perilaku Organisasi, Konsep, Kontroversi, Aplikasi*, Edisi Bahasa Indonesia Jilid I, 1996. Didistribusikan oleh PT. Prenhallindo, Jakarta.
- Rochmat Soemitro, 1993. *Pajak Penghasilan*, Edisi Revisi, Cetakan keempat : PT. Eresco, Bandung.
- Siagian, Sondang P., 1996. *Filsafat Administrasi*, Cetakan ke 24, 1996. Penerbit PT. Toko Gunung Agung, Jakarta.
- Singgih Santoso, 2000. *Mengolah Data Statistik Secara Profesional*, Versi 7.5, Jakarta : PT. Elex Komputindo Kelompok Gramedia.
- Tim Redaksi Tatanusa, 2000. *Seri Undang-Undang Perpajakan, Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Jakarta, Indonesia.